

DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN YARU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Albertus Lalaun, Agus Siahaya

Ahli bidang ekonomi

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon. Indonesia

email : Siahaya_agus@yahoo.com

ABSTRAK

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan, yang di sebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Kemiskinan, Program PNPM Mandiri.

PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal.

Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang sistemik dan menyeluruh

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah.

Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (teori Nurkse) dan telah

dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia (Sumanta, 2005). Lingkaran kemiskinan ini disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terciptanya tingkat pembentukan modal. Sedangkan pembentukan modal diperoleh dari tingkat tabungan. Ada dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan modal. **Pertama**, penawaran modal. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah. **Kedua**, permintaan modal. Di negara miskin keinginan untuk menanamkan modal rendah. Hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah. Logika berpikir yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia. Sebuah pernyataan yang tidak berujung pangkal bahwa negara miskin karena tidak punya apa-apa, dan tidak punya apa-apa yang menyebabkan negara menderita kemiskinan. Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para sarjana untuk memotong lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, yaitu (Agus Suman, 2006):

1. Menggali potensi kekayaan alam.
2. Meningkatkan produktivitas kerja.
3. Menggiatkan masyarakat untuk menabung.
4. Memberikan pinjaman untuk modal usaha.

Banyak pihak yang salah persepsi mengenai kemiskinan, yaitu kesejahteraan erat kaitannya dengan keterampilan yang dimilikinya yang diartikan, kesejahteraan hidup tidak bisa terwujud jika seseorang tidak memiliki keterampilan. Atas dasar ini, setiap pemberi dana atau modal tidak akan memberikan pinjaman modal kepada

seseorang yang tidak terampil, kecuali orang tersebut diberi pelatihan terlebih dahulu. Keterampilan akan muncul dengan sendirinya, melalui adanya modal dan usaha yang dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) adalah program nasional dalam mewujudkan kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pada tahun 2007 program ini bernama P2KP (Proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan) dan berganti nama menjadi PNPM Perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) sejak tahun 2008. Penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia jelas tidak hanya menjadi milik perdesaan (petani, buruh tani, buruh nelayan, dan sebagainya) tetapi juga merupakan masalah perkotaan. Masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah paten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut,

tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di perdesaan. Kemiskinan kota sebagai bagian dari kemiskinan nasional di Indonesia juga menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani. Sebagai warisan dan historis yang sudah berabad-abad, sejak munculnya kota itu sendiri, kaum miskin perkotaan menjadi sebuah fenomena masalah sosial yang memprihatinkan, dengan tingkat penanggulangan yang lebih memprihatinkan, seolah-olah kemiskinan itu sendiri bersifat abadi, lestari dan tidak bisa dirubah lewat aksi maupun reformasi apapun. Kota-kota di Indonesia yang sekilas kelihatan sebagai simbol kemajuan dan budaya yang lebih maju dan seharusnya demikian, ternyata masih dipenuhi oleh problem kemiskinan dengan segala masalah sosial yang disebabkan atau berdampingan dengan masalah sosial lainnya.

Kabupaten MTB, khususnya di kecamatan Yaru adalah salah kota yang berada di Indonesia yang turut mendapatkan program nasional yang di sebut dengan PNPB Perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan). Namun dalam pelaksanaannya program nasional tersebut belum dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana faktor tersebut terdiri dari masyarakat belum memiliki keterampilan yang memadai, dan turut berpengaruh kepada setiap pemberi dana atau modal yang diberikan. Ada sebagian masyarakat yang berhasil dalam program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat secara nasional apabila diberi pelatihan terlebih dahulu.

KAJIAN TEORI

Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemiskinan

Konsep Pemberdayaan. Istilah pemberdayaan pertama kali digunakan oleh aktivis Gerakan Black Panther dalam mobilisasi politik di USA pada 1960-an. Konsep ini dormant selama dekade 1970-

an. Pertengahan dekade 1980-an, Gerakan Kaum Wanita mempopulerkan kembali konsep pemberdayaan. Kini konsep “pemberdayaan” telah masuk keberbagai disiplin ilmu, baik pada tataran teori maupun praktek. Bahkan, istilah “pemberdayaan” telah menjadi suatu kata plastis, yang digunakan dalam berbagai konteks, sehingga mengaburkan makna yang sebenarnya (Aithai, 2005).

Makna pemberdayaan menurut kamus Oxford seperti dikutip dari situs Empowermentillustrated.com (2005) bahwa, kata empower sinonim dengan memberi daya atau kekuasaan kepada. Ada dua citra pemberdayaan, yaitu:

- 1) Yang memberi manfaat baik kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Tipe inilah yang disebut sebagai pemberdayaan (empowerment)
- 2) Kekuasaan di dapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri. Hal ini disebut sebagai “self-empowerment” atau pemberdayaan sendiri. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

David Korten (2004) menjelaskan, bahwa, gerakan pemberdayaan diawali dari munculnya paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (rakyat), yang diakui sebagai “pembangunan alternatif,” misalnya, menyebut ciri-ciri paradigma pembangunan berpusat pada rakyat sebagai berikut: Pertama, logika yang dominan dari paradigma ini adalah logika mengenai suatu ekologi manusia yang seimbang; Kedua, sumber daya utama berupa sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang tak habis-habisnya; dan Ketiga, tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi manusia.

Paradigma pemberdayaan dari David Korten ini memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan

sebagai aktor “yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.” Konsekuensinya, pembangunan yang berpusat pada rakyat memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal dan sistem-sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang berskala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri. Model pembangunan ini punya perbedaan fundamental di dalam karakteritik dasarnya dibandingkan dengan strategi pertumbuhan atau strategi kebutuhan dasar yang selama ini mendominasi agenda pembangunan di Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Suharto (2005) menyatakan bahwa, secara konseptual pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: 1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi

dengan cara apapun; dan 2) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Berdasarkan penjelasan berbagai konsep teori di atas, maka pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai “Upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri,” atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut.”

Konsep Kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan, yang di sebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2005).

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya (Susanto; 2006).

Cox (2005) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi: 1) kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengkalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi, 2) kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan olehhakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan), 3) kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas, dan (4) kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Berdasarkan berbagai penjelasan konsep di atas, maka kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kekurangan dari individu atau kelompok, baik kekurangan ekonomi, sosial, dan politik atau kekurangan masyarakat secara absolut, relatif dan kultural serta kekurangan terhadap akses informasi dan globalisasi yang menyebabkan individu dan kelompok masyarakat tersebut tidak dapat beraktivitas sesuai dengan tuntutan kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya.

Program Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menetapkan 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagai instrument percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat/ Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang termasuk dalam Klaster 2 terdiri dari berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah diluncurkan Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah merupakan repressitasi dari kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Klaster 2) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan: a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah

daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Pengertian Kesejahteraan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pengertian Kesejahteraan. Istilah umum, kesejahteraan atau sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera juga mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Keadaan sejahtera itu juga digambarkan dalam UU No 6 tahun 1974 dengan sangat abstrak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin ... dan seterusnya. Lebih lengkap, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (www.menkokesra.go.id).

Walaupun sulit diberikan pengertian, namun kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhi kebutuhan dasar, makmur, sehat, damai dan selamat, beriman dan bertaqwa. Untuk mencapai kesejahteraan itu manusia melakukan berbagai macam usaha, misalnya di bidang pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan serta keagamaan, pertahanan-keamanan dan sebagainya. Manusia juga melakukan upaya-upaya secara individu serta berkelompok. Upaya mencapai kesejahteraan lewat kelompok misalnya

membentuk paguyuban, koperasi, asosiasi, organisasi serta membentuk Negara. Kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiriah/fisik dan batiniah. Namun, mengukur kesejahteraan, terutama kesejahteraan batin/spiritual, bukanlah yang mudah. Kesejahteraan yang bersifat lahir yang biasa dikenal dengan kesejahteraan ekonomi lebih mudah diukur daripada kesejahteraan batin. Ukuran kesejahteraan lebih kompleks dari kemiskinan. Kesejahteraan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian. Kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, dan lainnya. (Ali Khomsan, www.kompas.com).

Kesejahteraan sosial Masyarakat.

Berdasar Pasal 3 UU Nomor 11/2009, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya

kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi

keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang: Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata Hypo yang berarti kurang dari dan Thesis yang berarti pendapatan. Sehingga yang dimaksud dengan hipotesis adalah kesimpulan atau pendapat yang masih kurang dan atau dugaan yang masih bersifat sementara yang mungkin saja benar atau mungkin salah. Berdasarkan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga landasan teori yang telah ada maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang masih perlu untuk diuji kebenarannya. Maka hipotesis yang didapat adalah : “ Diduga bahwa variabel

dampak program pemberdayaan (X) berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Deskriptif Approach*) baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Metode analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Lokasi atau tempat yang akan dijadikan penelitian adalah kecamatan Yaru, kabupaten Maluku Tenggara Barat. Waktu penelitian yang akan dilakukan adalah 3 bulan.

Jenis data yang digunakan adalah:

1. Data primer yang di dapat dari hasil wawancara, kuesioner, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.
2. Data sekunder yang diperoleh dari masyarakat usia tenaga bekerja (produktif) atau instansi- instansi terkait.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling (pengambilan sampel secara acak yang sederhana) dengan teknik randomisasi, yaitu suatu teknik dengan mengambil individu untuk sampel dari suatu populasi dengan cara random, sampel yang diperoleh akan bersifat random sampling jika tiap-tiap individu diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Sampel dilakukan dengan cara pengambilan secara undian kepada semua bagian yang ada di kecamatan Yaru dan usia tenaga kerja (produktif) memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan untuk bagian yang terpilih, maka usia tenaga kerja (produktif) bagian tersebut akan menjadi responden. Jumlah populasi usia tenaga kerja (produktif) yang mendapatkan program pemberdayaan pada kecamatan Yaru adalah 85 orang dan diambil sampel sebanyak 30 orang.

Menurut Widodo (1998 : 20) data primer merupakan hasil dari wawancara, hasil kuesioner dan observasi.

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data lain. Pelaksanaan dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Metode wawancara/interview ini ditujukan kepada para usia tenaga kerja (produktif) sebagai kewirausahaan, serta mencari informasi dari kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan tersebut bersifat terbuka jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban telah disediakan. Metode kuisisioner ini diberikan kepada para usia tenaga kerja (produktif) sebagai kewirausahaan.
3. Observasi merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan secara langsung oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Metode ini membandingkan antara apa yang diketahui melalui kuisisioner dengan wawancara. Metode ini ditujukan kepada objek yang bersangkutan.
4. Metode Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari atau menggunakan catatan-catatan yang ada pada masyarakat desa Ihamahu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Untuk data sekunder dapat dilakukan dengan studi literatur yaitu mencari data melalui buku-buku yang relevan dengan obyek penelitian untuk mendukung data-data yang sudah ada, serta mencari informasi melalui internet (artikel dan jurnal), informasi melalui media yang berhubungan dengan penelitian ini, dan lain-lain.

Untuk Metode analisis Data yang digunakan adalah Regresi Sederhana. Rumus Regresi Sederhana yang akan digunakan dalam penelitian:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana :

\hat{Y} = Kesejahteraan masyarakat

X = Dampak program pemberdayaan

a = Masyarakat

b = Faktor yang mempengaruhi dampak program pemberdayaan.

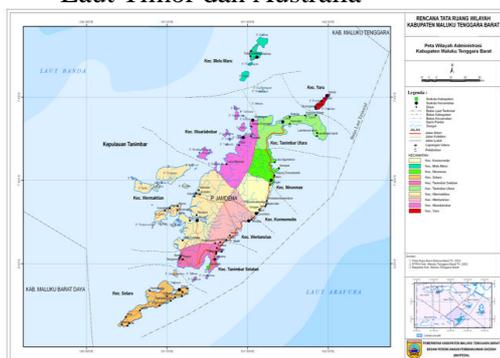
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum dan karakteristik tempat/lokasi/objek/unit penelitian

1. Kondisi Umum

Secara administratif pemerintahan, wilayah kecamatan Yaru berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dengan batas-batas wilayah kecamatan Yaru sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Serat Orafuan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Timor dan Australia



Pertumbuhan penduduk masyarakat kecamatan Yaru tahun 2014 dapat dikatakan tidak terdapat penambahan penduduk, hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada data keadaan masyarakat

pada kantor kecamatan Yaru tahun 2013-2014, dimana pada tahun 2013 jumlah jiwa 5.997 orang, dengan jumlah laki-laki 3035 orang dan wanita 2965 orang. Pada tahun 2014 dengan jumlah jiwa 5228 orang, dengan jumlah laki-laki 2651 orang dan wanita 2577 orang.

1. Keadaan Sosial Budaya

Pada data pekerjaan pokok/mata pencaharian hidup jenis pekerjaan pokok masyarakat kecamatan Yaru yang berada pada tingkat tertinggi yaitu petani/pekebun dan kebanyakan tanaman yang di tanam adalah umumnya mereka menanam tanaman umur pendek yang sesuai dengan tanah mereka yang kering. Jenis tanaman antara lain; kacang tanah, kacang hijau, jagung kacang-kacangan, ubi-ubian. Dan pada tanaman umur panjang adalah kelapa yang buahnya akan dijadikan kopra. Pada bidang perikanan, terlihat banyak hasil-hasil laut yang dapat diperoleh seperti ikan, lolah, taripang, rumput laut/agar-agar, dan lain-lainnya sedangkan dalam bidang peternakan mereka memelihara ayam, kambing, sapi, babi. Hasilnya pun dijual untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

2. Pendapatan Pokok Rumahtangga

Rata-rata pendapatan pokok rumahtangga per bulan pada masyarakat kecamatan Yaru, berkisar antara Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000,-. Dari gambaran umum data potensi yang ada pada masyarakat kecamatan Yaru mempunyai sumber daya alam yang melimpah baik darat maupun laut yang dapat dijadikan usaha demi pemenuhan ekonomi, namun masyarakat belum memiliki keterampilan yang memadai, dan turut berpengaruh kepada setiap pemberi dana atau modal yang diberikan dan pengelolannya masih menggunakan teknologi yang tradisional sehingga mutu dari produk tersebut selalu berubah-ubah tidak tetap, sehingga belum dapat

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara baik.

Analisis Data dan Penyajian Hasil Penelitian

Data hasil penelitian Dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat akan dianalisis dan diuji hipotesisnya untuk membuktikan diterima atau ditolak setiap hipotesis yang diajukan. Untuk melakukan pengujian hipotesis terdapat langkah-langkah sebagai berikut.

1. Validasi Instrumen

Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain validitas berkaitan dengan ketepatan dengan alat ukur. Dengan instrumen yang valid akan menghasilkan data yang valid pula atau dapat juga dikatakan bahwa jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka instrumen itu juga valid.

Dalam penelitian ini untuk menunjukkan instrumen memiliki validitas, maka digunakan rumus korelasi *product moment* yakni sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

X = Skor Butir

Y = Skor Total

r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa instrumen yang digunakan adalah instrumen angket untuk mendapatkan informasi tentang Dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Yaru dan hanya mewakili dari sampel yakni sebanyak 10 orang, dari hasil uji coba perangkat kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dan dibandingkan dengan nilai harga kritik untuk validitas butir instrumen adalah 0,3. Artinya apabila r_{xy} lebih besar atau sama dengan 0,3 ($r_{xy} \geq$

0,3), nomor butir tersebut dikatakan valid disimpulkan bahwa instrumen angket tersebut adalah valid. Sebaliknya apabila r_{xy} lebih kecil dari 0,3 ($r_{xy} < 0,3$), nomor butir tersebut dikatakan tidak valid. Kesimpulan hasil analisis, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1
Kesimpulan Hasil Validitas Instrumen

No Item	Responden	Korelasi (r_{xy})	Harga Kritik	Keterangan
1	N = 10 Orang	0.73946	0.3	Valid
2		0.78501	0.3	Valid
3		0.90974	0.3	Valid
4		0.70104	0.3	Valid
5		0.69525	0.3	Valid
6		0.72062	0.3	Valid
7		0.84914	0.3	Valid
8		0.91107	0.3	Valid
9		0.92754	0.3	Valid
10		0.82965	0.3	Valid
11		0.69711	0.3	Valid
12		0.78501	0.3	Valid
13		0.7533	0.3	Valid
14		0.85377	0.3	Valid
15		0.71545	0.3	Valid
16		0.65264	0.3	Valid
17		0.66942	0.3	Valid
18		0.85377	0.3	Valid
19		0.74743	0.3	Valid
20		0.65644	0.3	Valid

Sesuai dengan data yang diperoleh pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa instrumen angket dengan semua butir soal telah memiliki nilai Korelasi (r_{xy}) dan dibandingkan dengan nilai harga kritik untuk validitas butir instrumen adalah 0,3. Dengan demikian diperoleh nilai r_{xy} lebih besar atau sama dengan 0,3 ($r_{xy} \geq 0,3$) maka nomor butir soal 1 sampai 20 tersebut dikatakan valid atau disimpulkan bahwa instrumen angket tersebut adalah valid.

2. Reliabilitas Instrumen

Kata reliabilitas dalam bahasa indonesia diambil dari kata *reliability* dalam bahasa Inggris, berasal dari kata asal *reliable* yang artinya dapat dipercaya. Instrumen tes dikatakan dapat dipercaya (*reliable*) jika memberikan hasil yang tetap atau ajeg (konsisten) apabila diujikan

berkali-kali. Dapat disimpulkan bahwa reabilitas berhubungan dengan ketetapan atau keajegan. Dalam penelitian ini untuk mengukur reliabilitas instrumen digunakan rumus *Alpha Chronbach* berikut ini :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k - 1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right]$$

Dimana:

- r_{11} = reliabilitas instrumen
- k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
- $\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir/item
- V_t^2 = varian total

Sedangkan untuk memperoleh jumlah varians butir dicari dulu varian setiap butir menggunakan rumus varians berikut :

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}{N}$$

Untuk mengetahui apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan dengan harga kritik atau standar reliabilitas. Harga kritik untuk indeks reliabilitas instrumen adalah 0.7. artinya suatu instrumen dikatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien *Alfa* sekurang-kurangnya 0.7. Kesimpulan hasil analisis reliabilitas instrumen, disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Kesimpulan Hasil Reliabilitas Instrumen

No Item	Responden	Varians Butir Instrumen	Alpha Chronbach (r_{11})	Keterangan
1	N = 10 Orang	0.99	0.94607	Reliabel
2		0.89		Reliabel
3		1.33		Reliabel
4		0.99		Reliabel
5		0.93		Reliabel
6		0.94		Reliabel
7		1.07		Reliabel
8		0.93		Reliabel
9		0.93		Reliabel

10	0.84	Reliabel
11	1.21	Reliabel
12	0.89	Reliabel
13	0.90	Reliabel
14	1.07	Reliabel
15	0.99	Reliabel
16	0.90	Reliabel
17	0.90	Reliabel
18	1.07	Reliabel
19	1.11	Reliabel
20	0.84	Reliabel

Sesuai dengan data yang diperoleh tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa instrumen angket dengan semua butir soal telah memiliki nilai Varians dan nilai Alpha sehingga kemudian dibandingkan dengan nilai harga kritik atau standar reliabilitas adalah 0.7. Artinya untuk validitas butir instrumen adalah 0,7. Dengan demikian diperoleh nilai *Alpha* lebih besar dari nilai kritis ($r_{11} > 0,7$ atau $0.95 > 0.7$) maka nomor butir soal 1 sampai 20 tersebut dikatakan Reliabel atau disimpulkan bahwa instrumen angket tersebut adalah Reliabel.

3. Uji Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengujih dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Yaru, dengan menggunakan rumus uji regresi sederhana, maka sebelumnya dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Buatlah H_a dan H_o dalam bentuk kalimat
 H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat
 H_o : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Buatlah H_a dan H_o dalam bentuk statistik
 $H_a : r \neq 0$
 $H_o : r = 0$
3. Buatlah tabel penolong untuk mengukur angka statistik

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	30	80	900	6400	2400
2	30	75	900	5625	2550

3	33	80	1089	6400	2640
4	33	70	1089	4900	2310
5	33	70	1089	4900	2310
6	32	80	1024	6400	2560
7	30	80	900	6400	2400
8	33	80	1089	6400	2640
9	30	75	900	5625	2550
10	32	75	1024	5625	2400
11	31	70	961	4900	2170
12	32	80	1024	6400	2560
13	31	75	961	5625	2325
14	32	70	1024	4900	2240
15	31	70	961	4900	2170
16	30	85	900	7225	2550
17	31	80	961	6400	2480
18	32	80	1024	6400	2560
19	30	75	900	5625	2250
20	31	80	961	6400	2480
21	32	80	1024	6400	2560
22	30	70	900	4900	2100
23	30	70	900	4900	2100
24	31	75	961	5625	2325
25	31	80	961	6400	2480
26	33	80	1089	6400	2640
27	30	80	900	6400	2400
28	32	75	1024	5625	2400
29	31	75	961	5625	2325
30	30	80	900	6400	2400
N	Σ X	Σ Y	Σ X ²	Σ Y ²	Σ XY
30	937	2295	30276	175225	73275

4. Memasukkan angka-angka statistik dan buatlah persamaan regresi :

(a) Menghitung rumus b

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{30(73275) - (937)(2295)}{(30)(30276) - (937)^2} = \frac{47835}{30311} = 1,57$$

(b) Menghitung rumus a

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n} = \frac{2295 - (1,57)(937)}{30} = \frac{823,91}{30} = 27,46$$

(c) Persamaan regresi dengan rumus :

$$\hat{Y} = a + bX = 27,46 + 1,57(X)$$

5. Membuat garis persamaan regresi :

(a) Menghitung rata-rata X dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n} = \frac{937}{30} = 31,23$$

(b) Menghitung rata-rata Y dengan rumus

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n} = \frac{2295}{30} = 76,5$$

4. Menguji Signifikansi

Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Hitung jumlah kuadrat regresi

[JK_{Reg(a)}] dengan rumus:

$$JK_{Reg(a)} = \frac{(\sum Y)^2}{n} = \frac{(2295)^2}{30} = \frac{2567025}{30} = 175567,5$$

2) Hitung jumlah kuadrat regresi

[JK_{Reg(b|a)}] dengan rumus:

$$JK_{Reg(b|a)} = b \left[\sum XY - \frac{\sum X \sum Y}{n} \right] = 1,57 \left[73275 - \frac{(937)(2295)}{30} \right] = 67845$$

3) Hitung jumlah kuadrat residu [JK_{Res}] dengan rumus :

$$JK_{Res} = \sum Y^2 - JK_{Reg(b|a)} - JK_{Reg(a)} = 175225 - 67845 = 107380$$

4) Hitung rata-rata jumlah kuadrat regresi (a) [RJK_{Reg(a)}] dengan rumus:

$$RJK_{Reg(a)} = JK_{Reg(a)} = 175567,5$$

5) Hitung rata-rata jumlah kuadrat regresi (b|a) [RJK_{Reg(b|a)}] dengan rumus:

$$RJK_{Reg(b|a)} = JK_{Reg(b|a)} = 67845$$

6) Hitung rata-rata jumlah kuadrat residu [RJK_{Res}] dengan rumus:

$$RJK_{Res} = \frac{JK_{Res}}{n-2} = \frac{107380}{28} = 3835$$

7) Mengujih signifikansi dengan rumus

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{Reg(b|a)}}{RJK_{Res}} = \frac{67845}{3835} = 17,69$$

8) Menentukan pengaturan ambil keputusannya atau kriteria uji signifikan:

Kaidah pengujian signifikansi:

Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka tolak H_0 (signifikan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tolak H_a (tidak signifikan)

9) Carilah nilai F_{tabel} menggunakan Tabel F dengan rumus: Tarif signifikansinya = 0,05

$$bd_{Res} = n-2 = 30 - 2 = 28$$

$$F_{tabel} = (1 - \alpha) (db Reg [b|a], [db Res])$$

$$F_{tabel} = F (1-0,05) (11, [28])$$

$$F_{tabel} = 4.20$$

Cara mencari F_{tabel} : Angka 1 = Pembilang

Angka 28 = Penyebut

Ternyata $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau 17.69 > 4.20 maka signifikan

10) Kesimpulan:

Karena itu F_{hitung} lebih besar F_{tabel} , maka tolak H_0 dan terima H_a .

Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis data dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya sebelum dampak program pemberdayaan ini diterapkan masyarakat tidak memiliki ketrampilan yang memadai, namun setelah diterapkan program pemberdayaan masyarakat mempunyai kesejahteraan yang baik.

Kesejahteraan tersebut diperoleh karena dalam program pemberdayaan masyarakat, program pemberdayaan pemerintah selalu memberikan ketrampilan berupa pelatihan kepada masyarakat terhadap program-program yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah selalu menyampaikan tujuan dari program pemberdayaan sehingga masyarakat mengetahui target yang harus dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian yang telah dilakukan antara dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Yaru kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pelaksanaan program pemberdayaan ternyata memberikan hasil yang berbeda secara signifikan terhadap dampak program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat atau terdapat pengaruh signifikan antara dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Yaru kabupaten Maluku Tenggara Barat. Terbukti dengan diperolehnya F hitung = 17,59 pada $\alpha = 0,05$ lebih besar dari F tabel = 4,20 pada $\alpha = 0,05$. Hal ini disebabkan oleh adanya ketrampilan dan pelatihan masyarakat dalam program pemberdayaan yang secara nyata dapat ditunjukkan oleh

masyarakat selama program pemberdayaan diberikan oleh pemerintah.

Pada saat diberikannya program pemberdayaan oleh pemerintah, masyarakat termotivasi oleh adanya program-program yang diajukan oleh pemerintah, sehingga berusaha untuk dapat menguasai program tersebut dan berusaha dapat menyelesaikan dengan baik secara individu maupun secara kelompok. Hal inilah yang kemungkinan besar menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya

SIMPULAN

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan di muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Yaru kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Program pemberdayaan masyarakat yang tepat dan sesuai yaitu dapat melakukan ketrampilan dan pelatihan atau menggunakan faktor pemberdayaan lain yang lebih tepat, sehingga dengan usaha yang semaksimal mungkin tentu akan mencapai kesejahteraan yang secara signifikan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Yaru kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan, masyarakat mempersiapkan diri agar selalu aktif dalam menunjang program pemerintah tersebut, dan dalam pelaksanaannya pemerintah melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). Jakarta : Balai Pustaka.
- Alan prouty dkk, 2010. Buku Panduan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin: Bappnas Dan Adb.
- Anonim, 2007, Pengertian PNPM Mandiri. <http://www.pnpm-mandiri.org/>. Di akses, 05 April 2015.
- Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial; 2005, Penduduk Fakir Miskin Indonesia, Jakarta: BPS.
- Budi Yuwono. P. 2008. Buku Pedoman Pelaksanaan Pnpm Mandiri Perkotaan 2008: Dapertemen Pekerjaan Umum
- Buku pedoman umum. 2007, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (pnpn) mandiri. Direktur Jendral Cipta Karya Dan Lingkungan Tim Penyusun PNPMMP. 2007. Pedoman Teknis Pembentukan/Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat. PMU/PROYEK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
- Cox, D; 2005, "Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region" makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia. Bandung; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Ismono, 2008. Pedoman teknis pendaftaran relawan dan pelaksanaan reambung kesiapan masyarakat (RKM). PMU/PROYEK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan Dan permukiman (PNPM MANDIRI PERKIM). Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PERMEN/M/2009.
- Korten, DC; 2004, Pembangunan yang Memihak Rakyat. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Diperbanyak oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
- Peraturan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Diperbanyak Oleh: Sekretaris Wakil Presiden RI Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Suharto, Edi; 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). Bandung.
- Susanto, H; 2006, Dinamika Penanggulangan Kemiskinan. Tinjauan Historis Era Orde Baru. Jakarta: Khanata-Pustaka LP3ES Indonesia dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Sumber Lain

- Ali Khomsan, www.Kompas.com/Di akses, 05 April 2015.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- UU No 6 tahun 1974 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- www.menkokesra.go.id/Di akses, 05 April 2015.